

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki komitmen tinggi dalam pemberian bantuan luar negeri yang ditunjukkan dengan penandatanganan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri (*Foreign Assistance Act*) yang membentuk USAID sebagai institusi penyalur bantuan luar negeri yang dihimpun dari dana masyarakat dan pemerintah Amerika Serikat (USAID, 2017). Melalui USAID, berbagai jenis bantuan disalurkan oleh Amerika Serikat, yakni dalam bidang ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, pembangunan berkelanjutan, dan lain-lain. Adapun bentuk bantuan USAID lainnya, yakni dalam bidang air yang disalurkan kepada negara-negara mitra dengan tujuan untuk meningkatkan, merencanakan, dan memberikan layanan sumber daya air bersih yang layak secara berkelanjutan. Program ini mendukung tujuan visi pemerintah Amerika Serikat dalam kebijakan luar negeri U.S. Government Global Water Strategy, yaitu mengatasi krisis air global. Masalah ini dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta lingkungan masyarakat (USAID, 2017).

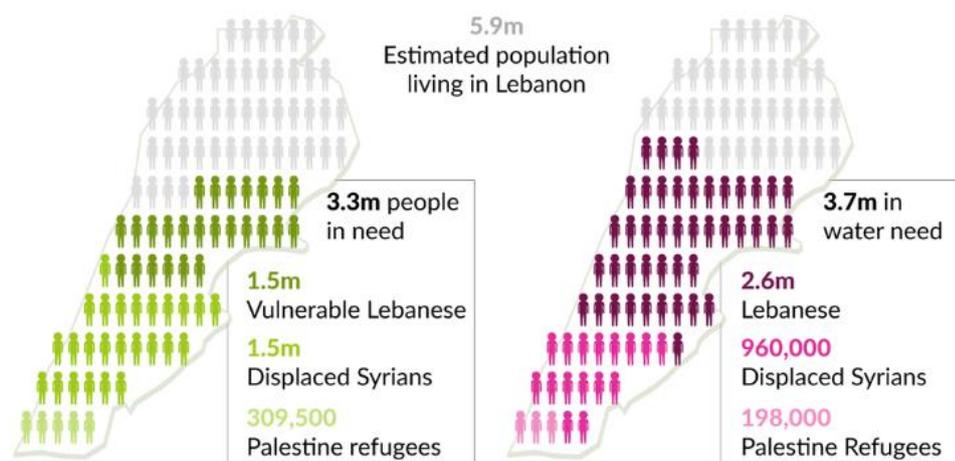
Lebanon menjadi salah satu negara penerima bantuan luar negeri Amerika Serikat dalam bentuk penyediaan air bersih. krisis air bersih di kawasan Lebanon yang dikhawatirkan mendisrupsi kehidupan masyarakat Lebanon itu sendiri dan kawasan di sekitarnya. Salah satu hal yang melatar belakangi krisis air di Lebanon adalah kedatangan pengungsi dari negara tetangga Suriah pada tahun 2012. Akibat perang,

Suriah selama enam tahun terakhir, mengalami krisis kemanusiaan yang mempengaruhi Lebanon secara signifikan, termasuk berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi negara dan penyediaan layanan dasar di setiap kota, seperti listrik, sanitasi, pengelolaan sampah, dan air (Walnycki, 2017). Keberadaan 1,5 juta pengungsi Suriah di Lebanon telah menimbulkan tekanan yang cukup signifikan pada pasokan air di negara tersebut. Menurut UN-Habitat, permintaan akan pelayanan air meningkat hampir 30 persen sejak dimulainya krisis. Sebanyak 3,7 juta orang, termasuk penduduk Lebanon dan pengungsi Suriah, membutuhkan pasokan air (Govt.Lebanon & UN RC/HC Lebanon, 2017). Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah masyarakat rentan yang ada di Lebanon, dan yang membutuhkan air.

Gambar 1.1 Grafik jumlah masyarakat di Lebanon dan yang membutuhkan air Tahun 2016

Sumber: Walnycki (2017)

Sebelum kedatangan pengungsi Suriah, krisis air di Lebanon sudah terjadi cukup lama. Kerusakan sipil dan kurangnya investasi selama beberapa dekade, diikuti



oleh konflik akibat ketegangan regional dan sektarian, mengakibatkan kerusakan

infrastruktur air di berbagai kota besar di negara tersebut. Menurut Rahman et al., (2014), Lebanon, yang memiliki banyak sungai dan sumber air, kaya akan air dibandingkan dengan Yordania, Israel, atau sebagian besar wilayah Suriah. Namun, jumlah air terbarukan yang tersedia di negara ini telah menurun dari lebih dari 1.000 meter kubik per tahun per orang – yang dianggap sebagai ambang batas kemiskinan air – menjadi sekitar 700m³ per orang sejak para pengungsi tiba. Faktor-faktor diatas bersama dengan faktor-faktor lainnya, seperti infrastruktur yang rusak, kurangnya data tentang akses air, pembangunan properti tanpa pengaturan, dan urbanisasi informal, telah menghambat upaya perencanaan kota dan peningkatan penyediaan air yang handal. Akibatnya, Lebanon memiliki sistem air yang rentan, meskipun sumber airnya relatif melimpah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), namun negara ini mengalami kekurangan air secara terus-menerus. Dampak krisis ini dirasakan secara berbeda di berbagai kota yang mengalami kesulitan air (Walnycki, 2017).

Kekurangan air sebenarnya disebabkan oleh gabungan berbagai faktor fisik, institusional, dan teknis; 1) Kurangnya pasokan air bersih dengan kualitas yang memadai sesuai dengan permintaan keseluruhan, yang pada dasarnya berarti kurangnya air secara fisik; 2) Tidak tersedianya akses terhadap layanan air bisa terjadi karena lemahnya sistem institusi yang tidak mampu menjamin pasokan air yang stabil kepada pengguna atau karena rumah tangga tidak mampu membayar biaya air atau pemasangan sambungan; 3) Kelangkaan tersebut disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, terlepas dari ketersediaan sumber daya air, karena terbatasnya dana (Walnycki, 2017).

Sebagian kecil rumah tangga dan bisnis di Lebanon memiliki akses terhadap air tujuh hari seminggu. Karena itu, penduduk Lebanon telah lama mengandalkan air minum kemasan atau air kemasan mahal yang sering kali terkontaminasi dari penyedia air umum (USAID, 2021). Selain itu, terkait akses terhadap air disebabkan oleh kurangnya sistem pengumpulan dan pengolahan air limbah, penggunaan air yang tidak efisien dalam pertanian, dan tingkat air yang tinggi tetapi tidak menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) memberikan prioritas bantuan lanjutan di sektor perairan di Lebanon melalui *Lebanon Water Project* (LWP) (USAID, 2021).

Penulis mengaitkan penelitian ini dengan beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Pertama, dari jurnal yang berjudul *Water Crisis and Water Management Strategies in The Syrian Refugee Settlements in Lebanon* oleh Nourelhuda Elmanaya, Harjito, Ph. D dan Eri Sofiatry, S.S. M. Sc (2022). Jurnal ini membahas menggambarkan krisis air di Lebanon dengan menganalisis kebijakan tata kelola air yang telah diterapkan oleh pemerintah Lebanon, khususnya pasca krisis pengungsi Suriah. Jurnal ini mendeskripsikan alasan utama dibalik kelangkaan air di Lebanon saat itu, selain menganalisis strategi tata kelola air yang diterapkan oleh pemerintah Lebanon dan organisasi internasional lainnya untuk mengatasi krisis ini dalam konteks krisis pengungsi Suriah di Lebanon. Kedua, dalam jurnal yang berjudul *It's About the Idea Hitting the Bull's Eye": How Aid Effectiveness Can Catalyse the Scale-up of Health Innovations* oleh Deepthi Wickremasinghe, Meenakshi Gautham, Nasir Umar, Della Berhanu, Joanna Schellenberg, and Neil Spicer (2018). Jurnal ini membahas mengenai menghubungkan dua bidang studi: peningkatan skala inovasi

maternal and newborn health (MNH), yang pada tahap percontohan didanai oleh donor eksternal, namun pemerintah dilibatkan dalam mengembangkannya, dan prinsip-prinsip implementasi bantuan di *low and middle-income countries* (LCIMs). Konsep ini berasal dari penelitian kualitatif yang melibatkan tiga negara yaitu, India, Nigeria, dan Ethiopia yang hasilnya dipublikasikan pada bulan Agustus 2018, jurnal ini menjelaskan indikator-indikator efisiensi bantuan luar negeri yang dapat membantu penulis untuk memahami apa saja indikator yang harus dipenuhi agar suatu bantuan dapat dianggap berjalan dengan baik.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka terdapat persamaan dan juga perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya, yakni pada jurnal pertama adalah sama-sama membahas krisis air yang sedang terjadi di Lebanon, namun perbedaannya adalah penulis lebih memfokuskan pada implementasi dari bantuan luar negeri yang diberikan Amerika Serikat dalam bentuk project LWP. Sedangkan, pada jurnal kedua peneliti sama-sama menggunakan konsep efektivitas dari Wickremasinghe dalam menganalisis implementasi bantuan luar negeri, namun perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut membahas studi kasus di India dan Nigeria sedangkan penulis menggunakan studi kasus Amerika Serikat dan Lebanon.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti pada latar belakang yang ada diatas, maka dari itu penulis menggunakan rumusan masalah: “Bagaimana efektivitas bantuan luar negeri Amerika Serikat melalui program *Lebanon Water Project* dalam menanggulangi krisis ketersediaan air bersih di Lebanon?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan yang ingin dicapai penulis secara khusus melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait efektivitas bantuan luar negeri Amerika Serikat melalui program Lebanon Water Project dalam menanggulangi krisis ketersediaan air bersih di Lebanon.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Bantuan Luar Negeri (Foreign Aid)

Bantuan luar negeri mengacu pada segala jenis bantuan yang ditransfer secara sukarela oleh suatu negara ke negara lain, seperti *Humanitarian aid*, *loan*, *grant* and *assistance* (Kenton, 2021). Bantuan luar negeri dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik suatu pemerintah, sehingga pemerintah dapat memperoleh pengakuan diplomatik untuk mendapatkan rasa hormat atas perannya di lembaga-lembaga internasional atau ditujukan sebagai peningkatan aksesibilitas diplomatnya ke negara-negara asing. Negara-negara maju mungkin memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang pasca bencana alam, masa perang, atau untuk mendorong pembangunan dan memerangi kemiskinan. Lebih lanjut, pelaksanaan bantuan luar negeri tidak lepas dari motivasi mendasar pemberi bantuan terhadap negara penerima (Kenton, 2021).

Menurut Morgenthau (2010), bantuan luar negeri adalah sebuah alat yang dapat meloloskan tujuan dari kebijakan luar negeri. Maka, pelaksanaan dari pemberian bantuan luar negeri dapat berpengaruh terhadap penipisan konsep kedaulatan suatu negara (Morgenthau & Thompson, 2010, 110). Kemudian, dalam buku yang ditulis oleh Lancaster (2007) yang berjudul *Foreign Aid: Diplomacy, Development: Domestic Politics* dalam jurnal bantuan luar negeri merupakan bantuan secara sukarela dari pemerintah untuk lembaga. Bantuan luar negeri memiliki tujuan untuk membantu memperbaiki kondisi manusia di negara penerima bantuan tersebut (Jannah et al., 2015, 3).

1.4.2 Efektivitas Bantuan Luar Negeri

Proses bantuan luar negeri melibatkan kerjasama antara negara pemberi bantuan dan negara penerima bantuan. Dalam efektivitas bantuan luar negeri, peneliti menggunakan konsep efektivitas bantuan luar negeri yang dirumuskan oleh Wickremasinghe et al., (2018), dalam menerapkan enam prinsip utama efektivitas bantuan dapat mendorong perkembangan inovasi, serta mengevaluasi sejauh mana hal ini telah berhasil dalam ketiga situasi dibawah, termasuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi.

Tabel 1.1 penerapan enam prinsip utama efektivitas bantuan di ketiga wilayah

Kunci: (+) = penggerak, (-) = penghalang

Prinsip efektivitas bantuan	Etiopia	Nigeria Timur Laut	Uttar Pradesh, India
Kepemilikan Negara	(+) Koordinasi pemerintah pusat	(-) Terbatasnya pendanaan negara	(+) Para pendukung pemerintah negara

	terhadap program-program yang didanai donor menumbuhkan rasa kepemilikan pemerintah, sehingga meningkatkan kemungkinan peningkatan inovasi	berarti layanan kesehatan dasar di pedesaan sebagian besar didanai dan didorong oleh donor, sehingga menghambat kepemilikan pemerintah negara bagian dan peningkatan inovasi	bagian mendorong diperkenalkannya inovasi-inovasi yang didanai oleh pihak luar, sehingga meningkatkan kemungkinan perluasan inovasi-inovasi tersebut
--	--	--	--

(-) Pergesekan di kalangan pejabat pemerintah menjadikan kepemilikan sebuah inovasi bersifat sementara

Penyelarasan	(+) Program-program yang didanai eksternal diharapkan selaras dengan strategi kesehatan nasional dan semakin banyak pelaksana yang mendukung paket kerja pemerintah, sehingga meningkatkan prospek inovasi yang dapat diterapkan	(-) Program-program yang didanai pihak luar diharapkan selaras dengan strategi pemerintah, namun terbatasnya koordinasi pemerintah terhadap kegiatan donor menyebabkan hilangnya potensi inovasi yang dapat diperluas	(+) Pembangunan ekonomi di India mengurangi ketergantungan pada bantuan luar; inovasi yang didanai secara eksternal harus selaras dengan strategi pemerintah di tingkat nasional dan negara bagian agar dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan
Harmonisasi	(+) <i>Kelompok Kerja Teknis</i> KMN yang dipimpin pemerintah memperkuat koordinasi mengurangi duplikasi inovasi yang didanai donor dan mendorong pertukaran informasi yang lebih baik (-) Keterlibatan pelaksana LSM dalam <i>Kelompok Kerja Teknis</i> hanya	(+) <i>Komite Teknis Inti Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir</i> yang dipimpin pemerintah federal mendorong kolaborasi di antara beberapa donor untuk menghindari duplikasi upaya (-) Lemahnya kapasitas Komite Teknis Inti Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir pemerintah untuk	(+) <i>Forum Mitra Kesehatan</i> memungkinkan program mitra dipetakan untuk menghindari duplikasi yang mengidentifikasi inovasi (-) <i>Forum Mitra Kesehatan</i> mempunyai keterlibatan yang terbatas dari donor

	sebatas menjawab pertanyaan teknis	mengkoordinasikan inovasi dan program yang didanai donor	dan kepemimpinan dari pemerintah
--	------------------------------------	--	----------------------------------

(-) Banyaknya donor dan pelaksana yang mengerjakan inovasi dan program kesehatan secara paralel berarti adanya persaingan kepentingan, prioritas dan cara kerja yang dipimpin oleh donor, yang mengarah pada prosedur paralel dan peningkatan beban kerja petugas kesehatan, sehingga mengurangi waktu pelaksanaannya.

(-) Kolaborasi di antara para pelaksana merupakan sebuah tantangan karena mereka perlu mengklaim atribusi atas keluaran inovasi sebagai bukti untuk dilaporkan kepada penyandang dana.

Transparansi dan akuntabilitas	(+) <i>Kelompok Kerja Teknis</i> mendorong transparansi dan pembagian informasi yang lebih baik, sehingga meningkatkan pemahaman tentang skalabilitas inovasi	(-) Transparansi terhambat oleh terbatasnya kapasitas pemerintah dalam melakukan koordinasi donor dan pelaksana di tingkat federal dan negara bagian	(+) <i>Forum Mitra Kesehatan</i> dipandang membantu mendorong transparansi dan berkembang sebagai ruang berbagi informasi mengenai inovasi (-) <i>Forum Mitra Kesehatan</i> sebagian besar masih dalam tahap awal
--------------------------------	---	--	--

(-) Pemantauan dan evaluasi serta sistem informasi yang dilakukan secara paralel oleh donor dan pelaksana membatasi peluang untuk membandingkan hasil inovasi dan meningkatkan pemahaman

Prediktabilitas bantuan	(+) <i>Dana Kinerja Tujuan Pembangunan Milenium</i> yang dikumpulkan menawarkan fleksibilitas bagi Kementerian Kesehatan untuk mendanai inovasi baru dalam skala besar	(-) Situasi keamanan menyebabkan para donor menjadi enggan mendanai inovasi percontohan untuk potensi peningkatan	(+) Tingkat pendanaan pemerintah yang relatif tinggi memitigasi dampak negatif fluktuasi pendanaan eksternal
-------------------------	--	---	--

(-) Beberapa donor terus menekankan pendanaan berbasis proyek, yang rentan terhadap perubahan prioritas kesehatan global

(-) Jangka waktu yang singkat untuk inovasi yang didanai donor membatasi waktu yang tersedia untuk meyakinkan pemerintah mengenai nilai inovasi tersebut untuk peningkatan skala besar

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat sipil	(+). Dengan bekerja secara kolektif, organisasi masyarakat sipil mulai mempengaruhi keputusan dan prioritas pemerintah dalam bidang kesehatan	(+). Masyarakat sipil mulai mempengaruhi keputusan dan prioritas pemerintah di bidang kesehatan (-). Terbatasnya kesadaran akan hak melemahkan kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah	(+). Melalui <i>Forum Mitra Kesehatan</i> , pemerintah menjadi lebih responsif terhadap organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi terhadap kebutuhan kesehatan
---	---	--	--

Sumber: Wickremasinghe et al., (2018)

Country ownership over program, yang dimana pada prinsip ini, Pemerintah mengatur kebijakan dan strategi pembangunan negara penerima, sehingga negara donor bisa menyelaraskan dana mereka sesuai dengan negara penerima. Hal ini merujuk pada peningkatan sistem pemerintahan melalui bantuan teknis dari donor dan pelaksana, serta menggunakan sistem yang ada di negara penerima, daripada menerapkan sistem yang berjalan secara terpisah atau paralel. Tanpa adanya prinsip ini, pemerintah tidak akan tertarik atau memiliki dorongan untuk kesuksesan suatu inovasi, sehingga kemungkinan besar inovasi tersebut tidak akan diterapkan. Pentingnya melibatkan pemerintah dalam setiap tahap pengembangan inovasi menjadi aspek utama dalam meningkatkan inovasi, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Namun tantangan dalam hal ini yakni, penerima dana eksternal terus melanjutkan penggunaan prosedur mereka sendiri karena mereka percaya sistem pemerintahan yang dianggap lemah dapat menghambat pelaksanaan,

sehingga membuat sulit bagi mereka untuk membuktikan dampak inovasi kepada para donor. Pendekatan ini juga mengurangi kontrol pemerintah, menyebabkan inovasi tidak berlangsung lama, dan kurangnya dukungan yang diperlukan untuk mendorong kemajuan (Wickremasinghe et al., 2018).

Alignment, pada prinsip ini, Menyesuaikan bantuan dengan prioritas, kerangka kebijakan, dan tujuan negara penerima merupakan langkah krusial dalam memperkuat rasa kepemilikan negara. Keselarasan sangatlah penting untuk memperluas jangkauan; pihak donor dan pelaksana harus memastikan bahwa inovasi mereka sejalan dengan kebijakan utama yang berlaku di tingkat nasional. Jika inovasi tersebut dapat membantu mengatasi masalah kebijakan yang diakui oleh pemerintah, maka ada peluang besar bagi pemerintah untuk menerapkannya dan mengembangkannya. Dalam hal menanggapi prioritas global atau donor untuk mendapatkan pendanaan bagi inovasi yang mungkin tidak selalu sesuai dengan prioritas negara, perubahan dalam prioritas dan kebijakan pemerintah (biasanya terjadi saat ada pemimpin atau pemerintahan baru) menyulitkan para pelaksana untuk menanggapi komitmen mereka terhadap hasil yang konsisten (Wickremasinghe et al., 2018).

Harmonization, Harmonisasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan jangkauan inovasi karena komunikasi yang terstruktur dengan pemerintah memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat tentang memperluas inovasi. Berbagi informasi tentang apa yang berhasil dan mengapa hal itu berhasil juga mendukung pengembangan inovasi yang lebih kuat. Kunci untuk meningkatkan keselarasan antara inovasi adalah adanya mekanisme koordinasi donor yang diarahkan oleh pemerintah dengan baik dan dukungan yang kuat dari pihak-pihak yang terlibat. Namun, hal ini dihalangi oleh keterbatasan terlibatnya pelaksana dalam

mengkoordinasi inovasi dan juga program yang didanai oleh negara donor, tantangan berikutnya yakni donor dan pelaksana bersaing atas kepentingan, prioritas dan cara kerja yang dipimpin oleh donor (Wickremasinghe et al., 2018).

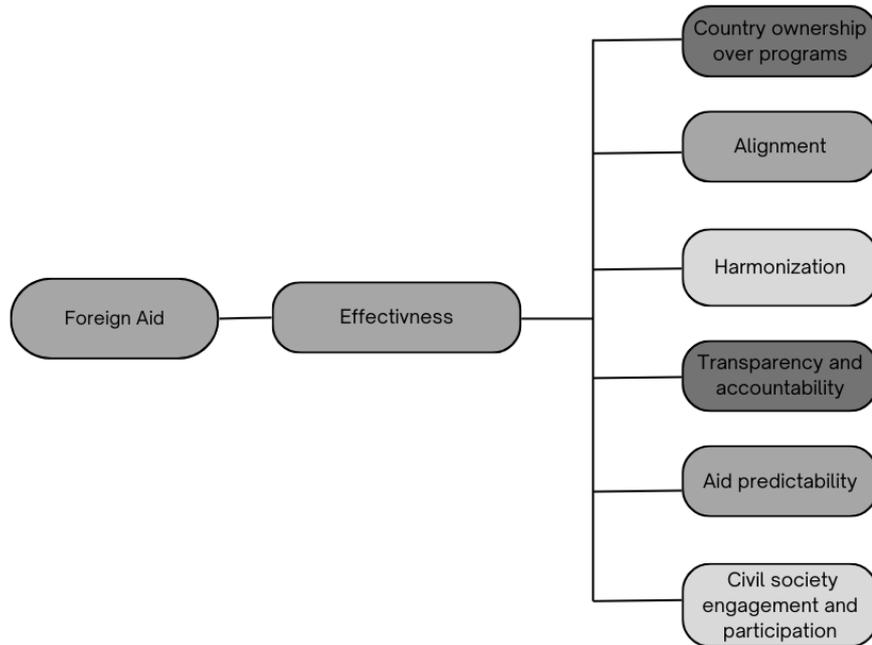
Transparency and accountability, pada prinsip ini keterlibatan donor yang terbuka mengenai program-program mereka dan dampak yang dihasilkannya, serta memberikan data yang sesuai kepada pemerintah penerima bantuan, sehingga meningkatkan tanggung jawab mereka terhadap pemerintah. Hal ini memungkinkan kemajuan karena terjadi penyampaian informasi yang lebih lancar dari donor dan pelaksana kepada pemerintah, dan koordinasi informasi di antara berbagai donor dan pelaksana meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membuat keputusan yang tepat terkait potensi peningkatan skala inovasi. Selain itu, berbagi informasi yang lebih baik mengenai inovasi dengan pemerintah cenderung memperkuat kepercayaan. Prinsip ini merupakan faktor pendukung yang penting dikarenakan dapat memperkuat inovasi. Namun ada juga penghalangnya yakni, keterbatasan kapasitas pemerintah dalam melakukan koordinasi begitu juga dengan pemantauan dan evaluasi serta sistem informasi yang dilakukan bersama oleh donor dan pelaksana, mengurangi kesempatan untuk membandingkan hasil inovasi dan meningkatkan pemahaman (Wickremasinghe et al., 2018).

Aid predictability, dalam prinsip ini donor harus jelas mengenai jangka waktu pendanaan yang akan diberikan kepada pemerintah dan antisipasi pendanaan masa depan untuk suatu inovasi. Jika memungkinkan, pemerintah dan pelaksana juga dapat mencari sumber pendanaan dari berbagai sumber untuk menciptakan stabilitas keuangan, hal ini akan memastikan kelangsungan dan peningkatan inovasi. Tetapi tanpa stabilitas keuangan negara, pemerintah penerima akan kesulitan merencanakan

komitmen jangka panjang dalam pengeluaran, termasuk pembiayaan inovasi yang diperkenalkan. Namun hal ini dihalangi oleh adanya hibah dengan jangka pendek yang menyebabkan gangguan pada layanan inovasi dan juga apabila donor menekankan dana berbasis pada proyek yang rentan berubah prioritas (Wickremasinghe et al., 2018).

Civil society engagement and participation, dalam prinsip ini keterlibatan masyarakat sipil dalam lembaga pengambil keputusan seperti mekanisme koordinasi donor memperkuat usaha-usaha meningkatkan inovasi dengan memberikan kesempatan kepada *NGO* untuk melakukan advokasi kepada pemerintah. Masyarakat sipil yang berperan aktif memiliki posisi yang strategis dalam mengangkat isu dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatian dan alokasi dana. Namun penghalang dalam hal ini yakni, terbatasnya kesadaran atas hak telah melemahkan *NGO* untuk meminta tanggung jawab kepada pemerintah (Wickremasinghe et al., 2018).

1.5 Sintesa Pemikiran



Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran

Sumber: Wickremasinghe et al., (2018), Olahan Penulis.

Berdasarkan sintesa pemikiran di atas, penulis menggunakan konsep *Effectiveness* untuk menjelaskan bagaimana efektivitas bantuan luar negeri Amerika Serikat melalui program *Lebanon Water Project* dalam menanggulangi krisis ketersediaan air bersih di Lebanon. Konsep *Effectiveness* memiliki enam indikator, yakni *Country ownership over programs*, *Alignment*, *Harmonization*, *Transparency and accountability*, *Aid predictability*, dan *Civil society engagement and participation*. *Country ownership over programs* dapat dianggap efektif apabila terdapat keterkaitan dan persetujuan antara pihak yang memberikan bantuan dan pihak yang menerimanya dalam pelaksanaan program, *Alignment* dapat dianggap

efektif apabila implementasi program bantuan luar negeri telah mencapai tujuan serta keselarasan antara pihak donor dan pelaksana. Sedangkan, *harmonization* dapat dianggap efektif ketika terjadi adanya komunikasi yang terstruktur antara pendonor dengan pemerintah yang memungkinkan mereka dalam memutuskan ketepatan dan efisiensi suatu kebijakan guna mengembangkan inovasi dan mengoptimalkan hasil.

Transparency and accountability dianggap efektif apabila adanya keterlibatan donor yang terbuka mengenai program-program mereka dan dampak yang dihasilkannya, *Aid predictability* dapat dianggap efektif apabila pendonor dengan jelas mengenai jangka waktu pendanaan yang akan diberikan kepada pemerintah dan antisipasi pendanaan masa depan untuk suatu inovasi. *Civil society engagement and participation* dikatakan efektif apabila adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam lembaga pengambil keputusan dengan memberikan kesempatan kepada *NGO* untuk melakukan advokasi kepada pemerintah.

1.6 Argumen Utama

Penelitian ini akan terfokuskan pada teori yang dikemukakan oleh Wickremasinghe et al. (2018) yang memiliki beberapa indikator efektivitas yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, antara lain *Country ownership over programs*, *Alignment*, *Harmonization*, *Transparency and accountability*, *Aid predictability*, dan *Civil society engagement and participation*.

Country ownership over programs telah diimplementasikan melalui program *Water Security Analysis* (WSA) yang telah disetujui oleh pemerintah Lebanon maka dapat dianggap efektif karena terdapat keterkaitan dan persetujuan antara pihak. Sedangkan, *Alignment* dimanifestasikan dalam hal keselarasan antara LWP dengan

kepentingan Lebanon melalui revitalisasi *Litani River Authority* (LRA) dan *Regional Water Establishment* (RWE) maka dari itu dapat dianggap efektif karena telah mencapai tujuan serta keselarasan antara pihak donor dan pelaksana. *Harmonization* terwujudkan melalui koordinasi LWP dan UNICEF dengan pemerintah dalam pekerjaan infrastruktur fisik air di Barr Elias, maka dapat dianggap efektif karena adanya komunikasi yang terstruktur antara pendonor dengan pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan. Kemudian, *Transparency and accountability* telah diwujudkan melalui adanya midterm report dan final report yang mencakup perkembangan proyek LWP yang memuat terkait alokasi pendanaan, sehingga dari laporan tersebut dapat menentukan efektivitas dari program yang diimplementasikan dan dampak yang dihasilkannya.

Aid predictability diwujudkan dalam kontribusi dan komitmen Amerika Serikat untuk memperpanjang perjanjian bantuan luar negeri pada tahun selanjutnya melalui program *Water Sanitation and Conservation* (WSC) project maka dapat dianggap efektif karena pendonor dengan jelas mengenai jangka waktu pendanaan yang akan diberikan kepada pemerintah dan antisipasi pendanaan masa depan untuk suatu inovasi. Terakhir, *Civil society engagement and participation*, yang telah dilaksanakan dalam membantu *Bank Audi* dan *Château St. Thomas* guna mengembangkan materi yang ditujukan untuk pelatihan kesadaran internal tentang konservasi air maka dapat dianggap efektif karena adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam lembaga pengambil keputusan dengan memberikan kesempatan kepada *NGO* untuk melakukan advokasi kepada pemerintah.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013). Pada penelitian ini penulis ingin meneliti terkait efektivitas pemberian bantuan luar negeri USAID ke Lebanon dalam program LWP, sehingga metode deskriptif menjadi metode yang paling efisien.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian dan pembahasannya agar tidak terlalu luas atau menimbulkan argumentasi yang bertentangan dengan rumusan masalah. Maka dari itu penelitian ini dibatasi pada tahun 2015-2021, dikarenakan pada tahun tersebutlah periode pelaksanaan program LWP di Lebanon.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder mengacu pada teknik pengumpulan data yang menggunakan informasi yang ada dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif. Teknik pengumpulan data sekunder meliputi analisis media, tinjauan pustaka, dan observasi. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sesuai dengan tema penelitian, seperti penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal, buku, makalah, website dan berita online yang resmi organisasi maupun pemerintah.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif, penulis menggunakan data-data terkait bantuan luar negeri USAID yang didasari dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis data dilakukan dengan maksud untuk mengetahui implementasi bantuan USAID dalam program LWP di negara Lebanon. Data yang didapatkan melalui jurnal, penelitian, buku, media pemerintahan resmi, serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu

BAB I : Bab ini berisikan Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Tinjauan Pustaka, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sintesa Pemikiran, Argumen Utama, Metode Penelitian.

BAB II : Bab ini menjelaskan implementasi program LWP secara efektif melalui *Country ownership over programs, Alignment,* dan *Harmonization* yang sesuai dengan konsep.

BAB III : Bab ini menjelaskan implementasi program LWP secara efektif melalui *Transparency and accountability, Aid predictability,* dan *Civil society engagement and participation* yang sesuai dengan konsep.

BAB IV : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.